

**Sosialisasi Pentingnya Pencatatan Administrasi Kependudukan Sebagai Bentuk
Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Kelurahan Rawa Mekar Jaya**

Listyorini Wisnuwardhani¹,

Keywords :

Pencatatan,
Administrasi,
Kependudukan.

Correspondensi Author

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas
Pamulang
Jl. Puspitek, Buaran, Kec,
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15310
Email:
listyorinir@gmail.com

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;
Reviewed: tgl-bln-thn
Revised: tgl-bln-thn
Accepted: tgl-bln-thn
Published: tgl-bln-thn

Abstrak.

kependudukan. pemanfaatan data kependudukan meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan sesuai Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. "Data kependudukan yang telah dirancang tersebut sangatlah penting dan dibutuhkan sehingga sistem informasi bisa diakses berbagai elemen masyarakat. manfaat yang dirasakan dari data kependudukan secara tidak langsung, karena banyak program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah membutuhkan data kependudukan.

Pendahuluan

Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kependudukan adalah hal yang berhubungan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data

kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Pendaftaran penduduk adalah proses pendataan dan pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dalam rangka penerbitan dokumen identitas penduduk (KK, KTP) atau surat keterangan kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena implikasi/pengaruhnya terhadap penerbitan atau perubahan KK,

KTP dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan status orang asing dari status kunjungan menjadi tinggal terbatas atau dari status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Pencatatan sipil adalah proses pembuatan catatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, pada register akta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

sebagai dasar pembuatan kutipan atau salinan akta. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan perubahan jenis kelamin. Kejelasan hubungan dan susunan sekelompok penduduk yang tinggal bersama dan membentuk satu kesatuan keluarga.

Menjadi dasar dalam penerbitan KTP dan pelayanan masyarakat lainnya. Apabila seseorang telah berkeluarga atau memisahkan diri dari keluarga dan membentuk rumah tangga sendiri.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah NKRI. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI-AK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengolahan informasi.

Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

Apabila sekelompok orang karena hubungan darah atau hubungan kekerabatan atau kepentingan lain tinggal dalam satu htp dan makan dari satu dapur. "Keterangan jati diri

dengan prinsip kualitas pelayanan publik yang prima yaitu cepat, tepat, dan akurat. Namun dalam kenyataannya, berdasarkan hasil prasurvei di Dinas Kependudukan dan Pencatatan.

penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan efektif sesuai

Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 24/2013") pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan¹.

penduduk yang menjelaskan tentang nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan, alamat, golongan darah dan agama.

Dengan kebijakan tentang administrasi kependudukan maka diharapkan proses status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah negara kesatuan republik Indonesia, pemerintah menyelenggarakan administrasi kependudukan, salah satunya adalah mengenai pendaftaran penduduk.

¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 24/2013")

Listyorini Wisnuwardhani
Sosialisasi Pentingnya Pencatatan Administrasi Kependudukan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum
Kepada Masyarakat Kelurahan Rawa Mekar Jaya

Metode

Metode yang dipakai dalam kegiatan ini adalah metode sosialisasi berupa penyuluhan, diskusi, tanya jawab disampaikan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang (Unpum) kepada Masyarakat Kelurahan Rawa Mekar Jaya.

Setelah Sosialisasi materi serta melakukan diskusi dalam rangka melatih kemampuan masyarakat untuk mengetahui pentingnya administrasi kependudukan, Masyarakat menjadi kelompok sasaran yang terlihat meningkat pengetahuannya dan pemahamannya tentang Pentingnya Administrasi Kependudukan.

Hasil Dan Pembahasan

1. Bagi Kelompok Sasaran

a. Pengetahuan

Setelah mengikuti dan mendengarkan materi sosialisasi serta melakukan diskusi dalam rangka melatih kemampuan masyarakat untuk memecahkan permasalahan administrasi kependudukan, para masyarakat yang menjadi kelompok sasaran terlihat meningkat dalam pengetahuan dan pemahamannya dalam permasalahan administrasi kependudukan setelah mahasiswa memberikan pemaparan.

b. Sikap

Para masyarakat menerima pemaparan secara baik dalam proses kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

2. Hasil Fisik Yang Bermanfaat Bagi Kelompok Sasaran

Para masyarakat dari kegiatan PKM ini memperoleh materi-materi sosialisasi yang disampaikan oleh tim Pkm disertai dengan Presentasi dan Diskusi. Selain itu tim PKM memberikan pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang diberikan kepada masyarakat kelurahan rawa mekar jaya tentang kesadaran hukum terhadap administrasi kependudukan.

3. Tanggapan dan Keaktifan Masyarakat Terhadap Kegiatan Selama PKM

Kegiatan sosialisasi pentingnya Administrasi Kependudukan ini ditanggapi secara positif dan antusias oleh masyarakat peserta PKM. Hal ini terbukti dengan beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh masyarakat.

Berikut ini beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh masyarakat :

1. Pentingkah Administrasi Kependudukan ?

Jawaban : Masyarakat diharapkan dapat menyadari pentingnya administrasi kependudukan (adminduk). Selain itu, masyarakat dan instansi pengguna data dapat memperbarui informasi mengenai adminduk. Masyarakat harus terus sadar tentang pentingnya adminduk. Setiap warga dan lembaga pengguna data juga mesti sadar untuk memperbarui data kependudukannya.

2. Bagaimana pencatatan diakta lahir jika anak lahir tanpa ayah?

Jawaban : Apapun kondisi anak dan orang tuanya, apakah orang tua tersebut menikah siri, hanya ada ibu saja, atau keberadaan kedua orang tua tidak diketahui, anak tetap berhak mendapatkan akta kelahiran. Dalam hal anak lahir di luar perkawinan, tetap dapat dibuatkan akta kelahiran. Namun, dalam akta kelahiran tersebut hanya ada nama ibu saja.

3. Jika Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengalami kerusakan, apakah kartu tersebut bisa dicetak kembali?

Jawaban : Bisa, datang saja langsung ke Disdukcapil terdekat.

4. Saat ini terdapat KIA yang digunakan oleh Anak, Apakah itu penting?

Jawaban : Penting dan Wajib, sebagai Kartu Identitas diri anak yang berlaku secara nasional, Karena sudah diatur dalam peraturan perundang undangan yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2016².

² Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2016

Pembahasan

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema “PENTINGNYA PENCATATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT” adalah untuk memberikan informasi mengenai pentingnya administrasi kependudukan dalam kehidupan bermasyarakat. administrasi kependudukan antara lain memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk, memberikan perlindungan status hak sipil penduduk.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini masyarakat telah merasakan manfaatnya, yakni memiliki tambahan pengetahuan dan pemahaman terkait pentingnya pencatatan administrasi kependudukan.

Lancarnya kegiatan PKM tersebut menunjukkan bahwa secara umum tujuan dari kegiatan tercapai

Kesimpulan

Berdasarkan rancangan dan pelaksanaan kegiatan PKM pada masyarakat Kelurahan Rawa Mekar Jaya, disimpulkan bahwa :

1. Kegiatan PKM yang dilaksanakan terlaksana dengan baik dan lancar.
2. Masyarakat begitu antusias mengikuti kegiatan PKM dikarenakan kurangnya informasi tentang pentingnya administrasi kependudukan dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

Ardiansyah, Fchrizal.(2018). Kinerja Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Gayo Lues Dalam Penyelenggaraan Pelayanan E-KTP Tahun 2016. Skripsi.

Alfian, Rachman Edytia.(2017). Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Pembuatan E-KTP Di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2015-2016. Skripsi.

Dwiyanto, Agus dkk.(2006). Reformasi Birokrasi Public Di Indonesia. Yogyakarta Gadjah Mada University Press

Hardiyani, Zachra Soniya.(2018). “Faktor faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten wonosobo”. Skripsi

Karin, D. K., Listyaningsih, L., & Stiawati. (2012). “Pengaruh Efektifitas Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang”. (Doctoral dissertation, FISIP Untirta).

Kurniasih, Laksmi, Wahyu, Widowati, Nina. (2016).”Pelayanan publik dalam menciptakan pelayanan prima di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang”.*Jurnal Administrasi Publik*, Vol 5 No.2

Mady, Khairul.(2009). ”Hakikat Dan Pengertian Pelayanan Prima”. Jakarta: Chama

Digital Mangkunegara, Anwar Prabu. (2002).*Manajemen Sumber Daya Manusia*.

Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Mangkunegara, Anwar Prabu. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.